



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu Pengelola Barang Harus Melakukan Pendaftaran dan Pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang Berada di Bawah Penguasaannya ke Dalam Daftar Barang Pengelola Menurut Penggolongan dan Kodefikasi Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
5. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub- subrincian objek.
7. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kodefikasi barang;
- b. Kode lokasi; dan
- c. Kode register.

BAB III
KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik daerah.
- (2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 4

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) meliputi:

- a. level 1 menunjukkan kode akun;
- b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 menunjukkan kode objek;
- e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan
- g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

BAB IV
KODE LOKASI

Pasal 5

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing barang milik daerah.

Pasal 6

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
 - b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
 - c. barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (kode 12); dan
 - d. barang milik lainnya (kode 13).
- (2) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah provinsi.
- (3) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah.
- (4) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah provinsi apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah kabupaten/kota, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah provinsi.

- (5) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah kabupaten apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah kabupaten/kota.

BAB V

KODE REGISTER

Pasal 7

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (barcode).
- (3) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:
- a. Persediaan;
 - b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
 - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - d. Akumulasi penyusutan;
 - e. Akumulasi Amortisasi;
 - f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
 - g. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penerapan penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada aplikasi di Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) dinyatakan tetap berlaku selama belum diubah oleh Pemegang hak cipta dalam hal ini Badan

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**NOMOR KODE UNIT DAERAH**

| NO. URUT | BIDANG | NO. KODE | UNIT BIDANG (SKPD) | NO. KODE |
|----------|----------------------------------|----------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DPRD/SETWAN | 01 | 1. DPRD | 01 |
| | | | 2. SEKRETARIAT DPRD | 02 |
| 2. | BUPATI | 02 | 1. BUPATI | 01 |
| 3. | WAKIL BUPATI | 03 | 1. WAKIL BUPATI | 01 |
| 4. | SEKRETARIAT DAERAH | 04 | 1. SEKRETARIAT DAERAH | 01 |
| | | | 2. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 02 |
| 5. | BIDANG KIMPRASWIL / PU | 05 | 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 01 |
| | | | 2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 02 |
| 6. | BIDANG PERHUBUNGAN | 06 | 1. DINAS PERHUBUNGAN | 01 |
| | | | 2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| 7. | BIDANG KESEHATAN | 07 | 1. DINAS KESEHATAN | 01 |
| 8. | BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 08 | 1. DINAS PENDIDIKAN | 01 |
| | | | 2. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 02 |
| 9. | BIDANG SOSIAL | 09 | 1. DINAS SOSIAL | 01 |
| | | | 2. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 02 |
| 10. | BIDANG KEPENDUDUKAN | 10 | 1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 01 |
| | | | 2. BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 02 |
| | | | 3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 03 |
| 11. | BIDANG PERTANIAN | 11 | 1. DINAS PERTANIAN | 01 |
| | | | 2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 02 |
| | | | 3. DINAS KETAHANAN PANGAN | 05 |
| 12. | BIDANG PERINDUSTRIAN | 12 | 1. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 01 |
| 13. | BIDANG PENDAPATAN | 13 | 1. BADAN KEUANGAN DAERAH | 01 |
| | | | 2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 02 |
| 14. | BIDANG PENGAWASAN | 14 | 1. INSPEKTORAT | 01 |
| 15. | BIDANG PERENCANAAN | 15 | 1. BADAN PERENCANAAN DAERAH | 01 |
| | | | 2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 02 |
| 16. | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 16 | 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 01 |
| 17. | BIDANG PARIWISATA | 17 | 1. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 01 |
| 18. | BIDANG KESATUAN BANGSA | 18 | 1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 01 |

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

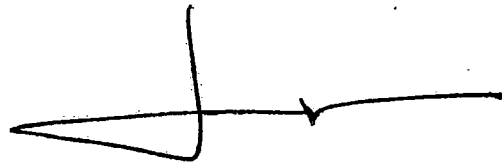
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal

2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal

2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017

NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2017

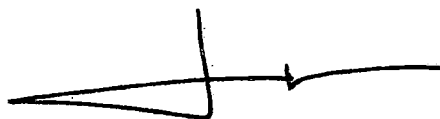
TANGGAL : 2017

TENTANG : PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KODE KOMPONEN PEMILIK BARANG

| NOMOR URUT | KOMPONEN PEMILIK BARANG | KODE |
|-----------------------|---|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 1. | BARANG MILIK PEMERINTAH PUSAT | 00 |
| 2. | BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | 11 |
| 3. | BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12 |
| 4. | BARANG MILIK LAINNYA | 13 |

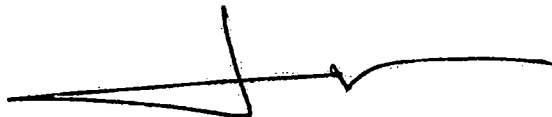
BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

| | | | | |
|-----|--|-----------------|---|----|
| | | | 2. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 02 |
| | | | 3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 03 |
| 19. | BIDANG KEPEGAWAIAN | 19 | 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 01 |
| 20. | BIDANG PENGHUBUNG | 20 | | |
| 21. | BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI | 21 | 1. DINAS KEARSIPAN | 01 |
| 22. | BIDANG BUMD | 22 | | |
| 23. | CADANGAN | 23 s/d 49 | | |
| 26. | KECAMATAN | 50 | 1. KECAMATAN RATAHAN | 01 |
| | | | 2. KECAMATAN PUSOMAEN | 02 |
| | | | 3. KECAMATAN BELANG | 03 |
| | | | 4. KECAMATAN RATATOTOK | 04 |
| | | | 5. KECAMATAN TOMBATU | 05 |
| | | | 6. KECAMATAN TOULUAAN | 06 |
| | | | 7. KECAMATAN TOULUAAN SELATAN | 07 |
| | | | 8. KECAMATAN SILIAN RAYA | 08 |
| | | | 9. KECAMATAN TOMBATU TIMUR | 09 |
| | | | 10. KECAMATAN TOMBATU UTARA | 10 |
| | | | 11. KECAMATAN PASAN | 11 |
| | | | 12. KECAMATAN RATAHAN TIMUR | 12 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

| | | | | |
|-----|--|-----------------|---|----|
| | | | 2. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 02 |
| | | | 3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 03 |
| 19. | BIDANG KEPEGAWAIAN | 19 | 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 01 |
| 20. | BIDANG PENGHUBUNG | 20 | | |
| 21. | BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI | 21 | 1. DINAS KEARSIPAN | 01 |
| 22. | BIDANG BUMD | 22 | | |
| 23. | CADANGAN | 23 s/d 49 | | |
| 26. | KECAMATAN | 50 | 1. KECAMATAN RATAHAN | 01 |
| | | | 2. KECAMATAN PUSOMAEN | 02 |
| | | | 3. KECAMATAN BELANG | 03 |
| | | | 4. KECAMATAN RATATOTOK | 04 |
| | | | 5. KECAMATAN TOMBATU | 05 |
| | | | 6. KECAMATAN TOULUAAN | 06 |
| | | | 7. KECAMATAN TOULUAAN SELATAN | 07 |
| | | | 8. KECAMATAN SILIAN RAYA | 08 |
| | | | 9. KECAMATAN TOMBATU TIMUR | 09 |
| | | | 10. KECAMATAN TOMBATU UTARA | 10 |
| | | | 11. KECAMATAN PASAN | 11 |
| | | | 12. KECAMATAN RATAHAN TIMUR | 12 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


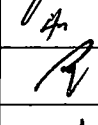
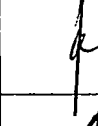
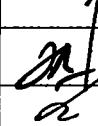
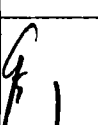
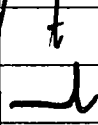
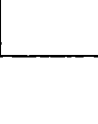
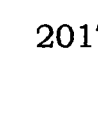

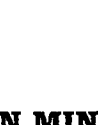


JAMES SUMENDAP

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

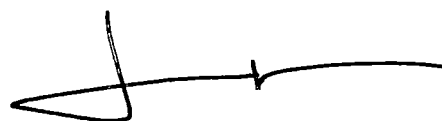
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|-----|--|---|
| 1. | Kasubid Inventarisasi |  |
| 2. | Kepala Bidang Aset |  |
| 3. | Sekretaris BKD |  |
| 4. | Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan |  |
| 5. | Kepala BKD |  |
| 6. | Inspektur |  |
| 7. | Asisten Administrasi Umum |  |
| 8. | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |  |
| 9. | Sekretaris Daerah |  |
| 10. | Wakil Bupati |  |
| 11. | Bupati Minahasa Tenggara | |

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 3 April 2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 3 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



FARRY FREYKE LIWE

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017
NOMOR ...361**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

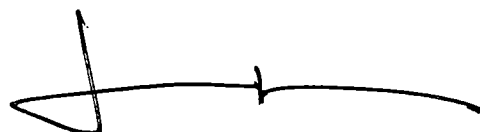
NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 April 2017

TENTANG : PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**KODE KOMPONEN PEMILIK BARANG**

| NOMOR URUT | KOMPONEN PEMILIK BARANG | KODE |
|-------------------|---|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 1. | BARANG MILIK PEMERINTAH PUSAT | 00 |
| 2. | BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | 11 |
| 3. | BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12 |
| 4. | BARANG MILIK LAINNYA | 13 |

| NO | PENGOLAH | PARAF |
|-----------|--|---|
| 1 | Kepala Sub Bidang Inventarisasi |  |
| 2 | Kepala Bidang Aset |  |
| 3 | Sekretaris BKD |  |
| 4 | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan |  |
| 5 | Kepala BKD |  |
| 6 | Inspektur |  |
| 7 | Asisten Bidang Administrasi Umum |  |
| 8 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |  |
| 9 | Sekretaris Daerah |  |
| 10 | Wakil Bupati |  |
| 11 | Bupati Minahasa Tenggara | DH. Mohon Ditandatangani |

BUPATI MINAHASA TENGGARA,**JAMES SUMENDAP**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 April 2017

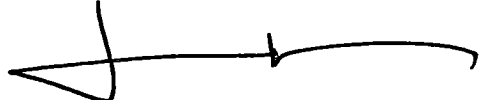
TENTANG : PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**NOMOR KODE UNIT DAERAH**

| NO. URUT | BIDANG | NO. KODE | UNIT BIDANG (SKPD) | NO. KODE |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DPRD/SETWAN | 01 | 1. DPRD | 01 |
| | | | 2. SEKRETARIAT DPRD | 02 |
| 2. | BUPATI | 02 | 1. BUPATI | 01 |
| 3. | WAKIL BUPATI | 03 | 1. WAKIL BUPATI | 01 |
| 4. | SEKRETARIAT DAERAH | 04 | 1. SEKRETARIAT DAERAH | 01 |
| | | | 2. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 02 |
| 5. | BIDANG KIMPRASWIL / PU | 05 | 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 01 |
| | | | 2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 02 |
| 6. | BIDANG PERHUBUNGAN | 06 | 1. DINAS PERHUBUNGAN | 01 |
| | | | 2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| 7. | BIDANG KESEHATAN | 07 | 1. DINAS KESEHATAN | 01 |
| 8. | BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 08 | 1. DINAS PENDIDIKAN | 01 |
| | | | 2. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 02 |
| 9. | BIDANG SOSIAL | 09 | 1. DINAS SOSIAL | 01 |
| | | | 2. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 02 |
| 10. | BIDANG KEPENDUDUKAN | 10 | 1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 01 |
| | | | 2. BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 02 |
| | | | 3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 03 |
| 11. | BIDANG PERTANIAN | 11 | 1. DINAS PERTANIAN | 01 |
| | | | 2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 02 |
| | | | 3. DINAS KETAHANAN PANGAN | 05 |
| 12. | BIDANG PERINDUSTRIAN | 12 | 1. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 01 |
| 13. | BIDANG PENDAPATAN | 13 | 1. BADAN KEUANGAN DAERAH | 01 |
| | | | 2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 02 |
| 14. | BIDANG PENGAWASAN | 14 | 1. INSPEKTORAT | 01 |
| 15. | BIDANG PERENCANAAN | 15 | 1. BADAN PERENCANAAN DAERAH | 01 |
| | | | 2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 02 |
| 16. | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 16 | 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 01 |
| 17. | BIDANG PARIWISATA | 17 | 1. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 01 |
| 18. | BIDANG KESATUAN BANGSA | 18 | 1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 01 |


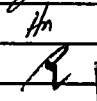
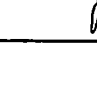
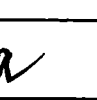
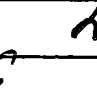
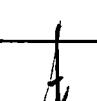
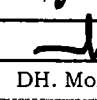
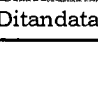


| | | | | |
|-----|--|-----------------|---|----|
| | | | 2. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 02 |
| | | | 3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 03 |
| 19. | BIDANG KEPEGAWAIAN | 19 | 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 01 |
| 20. | BIDANG PENGHUBUNG | 20 | | |
| 21. | BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI | 21 | 1. DINAS KEARSIPAN | 01 |
| 22. | BIDANG BUMD | 22 | | |
| 23. | CADANGAN | 23 s/d 49 | | |
| 26. | KECAMATAN | 50 | 1. KECAMATAN RATAHAN | 01 |
| | | | 2. KECAMATAN PUSOMAEN | 02 |
| | | | 3. KECAMATAN BELANG | 03 |
| | | | 4. KECAMATAN RATATOTOK | 04 |
| | | | 5. KECAMATAN TOMBATU | 05 |
| | | | 6. KECAMATAN TOULUAAN | 06 |
| | | | 7. KECAMATAN TOULUAAN SELATAN | 07 |
| | | | 8. KECAMATAN SILIAN RAYA | 08 |
| | | | 9. KECAMATAN TOMBATU TIMUR | 09 |
| | | | 10. KECAMATAN TOMBATU UTARA | 10 |
| | | | 11. KECAMATAN PASAN | 11 |
| | | | 12. KECAMATAN RATAHAN TIMUR | 12 |

| NO | PENGOLAH | PARAF |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Kepala Sub Bidang Inventarisasi | |
| 2 | Kepala Bidang Aset | |
| 3 | Sekretaris BKD | |
| 4 | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan | |
| 5 | Kepala BKD | |
| 6 | Inspektur | |
| 7 | Asisten Bidang Administrasi Umum | |
| 8 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | |
| 9 | Sekretaris Daerah | |
| 10 | Wakil Bupati | |
| 11 | Bupati Minahasa Tenggara | DH. Mohon Ditandatangani |

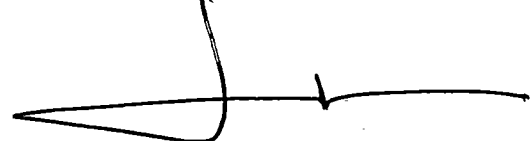
BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP

| AKUN | KELOMPOK | JENIS | OBJEK | RIONB CJIE AKN | RIONB UCY BIE AKN | SRI OBNB -CJ SIE UAK BN | URAIAN |
|------|----------|-------|-------|----------------------|----------------------------|--|--|
| 1 | 5 | 6 | 01 | 01 | 01 | 003 | Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG) |
| 1 | 5 | 6 | 01 | 01 | 01 | 004 | Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur |
| 1 | 5 | 6 | 01 | 01 | 02 | | AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN |
| 1 | 5 | 6 | 01 | 01 | 02 | 001 | Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang |
| 1 | 5 | 6 | 01 | 01 | 02 | 002 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah. |
| 1 | 5 | 6 | 01 | 01 | 02 | 003 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya |

| NO | PENGOLAH | PARAF |
|----|--|---|
| 1 | Kepala Sub Bidang Inventarisasi |  |
| 2 | Kepala Bidang Aset |  |
| 3 | Sekretaris BKD |  |
| 4 | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan |  |
| 5 | Kepala BKD |  |
| 6 | Inspektur |  |
| 7 | Asisten Bidang Administrasi Umum |  |
| 8 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |  |
| 9 | Sekretaris Daerah |  |
| 10 | Wakil Bupati |  |
| 11 | Bupati Minahasa Tenggara | DH. Mohon Ditandatangani |

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP